

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberitaan mengenai politik pada umumnya memiliki tingkat kerumitan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemberitaan lainnya. Kerumitan tersebut dapat terjadi karena dalam pemberitaan mengenai politik seringkali terdapat pembentukan opini publik yang nantinya akan memiliki pengaruh terhadap sikap *audiens*, sebab dapat dikatakan tujuan dari pemberitaan politik cenderung pada pembentukan pendapat umum (Hamad, 2004). Media dengan mudah dapat menggiring publik kearah yang diinginkan berdasarkan tujuan melalui pemberitaan dengan *framing* yang telah dikonstruksi. Pada dasarnya menurut (McQuail, 2011) media selalu mengkonstruksikan atau membentuk berita yang akan disiarkan. Pendapat ini berakar dari salah satu proposisi utama dari teori konstruksionisme sosial, yaitu media tidak bisa memberikan realitas sosial yang objektif karena semua fakta adalah hasil interpretasi (McQuail, 2011). Hal ini dikarenakan media memiliki ideologi, sikap politik, kebijakan redaksional tertentu terhadap suatu kekuatan politik, yang dimana faktor-faktor tersebut dapat berpengaruh terhadap penggunaan simbol politik (*language of politic*) serta pengemasan pesan (*framing strategies*). Maka satu peristiwa politik bisa menimbulkan opini yang berbeda-beda, tergantung media mana yang melakukan pemberitaan (Hamad, 2004). Pemberitaan mengenai korupsi atau isu pemberantasan korupsi merupakan salah satu pemberitaan yang terasa sangat dekat karena berdampak langsung kepada masyarakat.

Isu pemberantasan korupsi di Indonesia dan KPK memiliki hubungan yang sangat erat, dimana KPK merupakan ujung tombak pemberantasan korupsi. Hal ini tidak terlepas dari sejarah dan harapan pada masa reformasi tentang Pengelolaan Negara yang Bersih dan Bebas KKN yang tercantum pada UU Nomor 29 Tahun 1999. Kemudian dilanjutkan dengan UU Nomor 30 Tahun 2002 yang merupakan awal dibentuknya KPK pada tahun 2002 oleh mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, yang mana pada saat itu Megawati melihat bahwa

institusi kejaksaan dan kepolisian dinilai kurang mampu untuk menangkap koruptor. Pembentukan KPK dilakukan bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga hukum yang ada sebelumnya, melainkan sebagai stimulus atau pendorong agar upaya pemberantasan korupsi di Indonesia menjadi lebih efektif.

KPK merupakan sebuah lembaga independen yang bergerak dalam bidang pemberantasan korupsi. KPK dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri dari 5 orang, yaitu seorang ketua yang merangkap sebagai anggota dan empat orang wakil ketua yang juga merangkap sebagai anggota. Pimpinan KPK selayaknya pemilihan presiden, yaitu menjabat selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam mengambil keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial, yaitu mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan bersama melalui musyawarah. Dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 16 September 2019 yang membahas tentang laporan Komisi III DPR atas hasil uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan, mengesahkan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK untuk periode 2019 – 2023. Kemudian Nawawi Pomolango, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, dan Lili Pantauli Siregar pun disahkan sebagai wakil ketua KPK

Pemberitaan mengenai KPK cukup menjadi sorotan di masyarakat Indonesia sekarang ini, karena menurut Indonesia *Corruption Watch* (ICW) dalam survei Indikator Politik pada tahun 2021 menunjukkan adanya penurunan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penurunan tingkat kepercayaan masyarakat kepada KPK dimulai sejak dari Firli Bahuri menjabat sebagai pimpinan KPK (Kompas.com, 2021).

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, dilansir dari menjelaskan faktor pertama yang menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan publik pada KPK adalah minimnya integritas pimpinan KPK karena pelanggaran kode etik. Salah satunya adalah pada Desember 2019 saat menjabat sebagai pimpinan KPK, Firli Bahuri merangkap jabatan sebagai Analis Kebijakan Badan Pemelihara Keamanan Polri. Dalam poin (i) Pasal 29 UU KPK, disebutkan bahwa pimpinan KPK harus melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota

KPK, dan poin (j) mengatur bahwa tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota KPK. Hal tersebut yang menyebabkan masyarakat tak percaya lagi pada KPK yang selalu mengkampanyekan nilai integritas (Kompas.com, 2021).

Faktor kedua yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat menurun kepada KPK adalah performa KPK yang *anjlok* di bawah kepemimpinan Firli Bahuri. Pada masa kepemimpinannya Jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) merosot tajam, kualitas penanganan buruk dan sering terjadi kebocoran informasi di tubuh KPK. Faktor terakhir dari merosotnya kepercayaan publik pada KPK adalah kebijakan pimpinan KPK yang kontroversial, seperti kebijakan dalam penggunaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sesuai mandat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK (Kompas.com, 2021).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sorotan dan menjadi perhatian publik belakangan ini karena pimpinan dari KPK melakukan pemecatan dan memberhenikan 58 pegawai yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada tanggal 30 September 2021. Hal ini berawal dari Ketua KPK Firli Bahuri pada 5 Januari 2021 yang mencetuskan usulan TWK sebagai *asesmen* peralihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlegimitasi dalam Perkom 1/2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK Menjadi ASN. Setelah proses *asesmen* TWK berlangsung, KPK menerbitkan SK Pimpinan KPK Nomor 652/2021 tentang hasil *asesmen* TWK; hasilnya 75 pegawai dinyatakan tidak lulus. Dalam konferensi pers 25 Mei 2021, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan 24 pegawai dari 75 orang akan dibina lagi untuk menjadi ASN. Dilansir dari Tempo.co pada 5 November 2021, sementara sebanyak 51 pegawai tetap tak lulus lantaran dianggap tidak bisa dilakukan pembinaan berdasarkan penilaian *asesor*. Total pegawai yang tidak lulus pun bertambah, Dari 24 pegawai yang dibina ulang oleh KPK, 7 pegawai di antaranya tidak lulus. Sehingga total pegawai KPK gagal menjadi ASN sebanyak 58 pegawai.

Kebijakan mengenai TWK yang menjadi syarat sebelum pegawai diangkat jadi ASN ini menjadi polemik karena diantara 51 pegawai yang tidak lulus terdapat nama nama penyelidik dan penyidik yang telah banyak menangani kasus

kasus korupsi di Indonesia, Seperti “Si Raja OTT” Harun Al Rasyid, Ketua WP KPK Yudi Purnomo, hingga penyidik Senior KPK Novel Baswedan. Selain itu *Ombudsman* RI selaku lembaga negara dengan kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik menyatakan adanya maladministrasi dalam proses *asesmen* TWK. Komnas HAM pun menilai TWK melanggar HAM salah satu diantaranya adalah Hak atas Pekerjaan, yang dimana tidak sesuai dengan jaminan konstitusi bahwa setiap orang berhak memiliki pekerjaan serta memperoleh penghasilan yang sesuai. Salah satu pegawai KPK juga menyebutkan bahwa dalam tes wawasan kebangsaan tersebut terdapat dugaan pelecehan seksual, dimana terdapat beberapa butir pertanyaan yang menjerus ke arah seksual dan hal hal yang bersifat privasi. Permasalahan permasalahan dari tes wawasan kebangsaan tersebut memunculkan dugaan pada beberapa kalangan bahwa adanya tes wawasan kebangsaan yang telah dilakukan adalah salah satu upaya melemahkan lembaga KPK.

Mantan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Giri Suprapdiono juga telah resmi dipecat dikarenakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Tidak lolosnya Giri Suprapdiono ini cukup kontroversial, pasalnya dikutip dari *tempo.co* Giri Suprapdiono merupakan pegawai KPK yang sering memberikan pengajaran tentang tes wawasan kebangsaan di sejumlah lembaga. Bahkan Giri juga merupakan lulusan terbaik pelatihan kepemimpinan nasional II angkatan XVII di Lembaga Administrasi Negara pada Desember 2020, serta menerima penghargaan Makarti Bhakti Nagari Award (*Kompas.com*, 2021).

Polemik akibat dari tes wawasan kebangsaan sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) ini menimbulkan banyak pertanyaan serta persepsi di benak masyarakat. Masih juga melekat dalam ingatan terkait Revisi Undang Undang KPK pada tahun 2019 yang dinilai melemahkan KPK karena adanya peralihan status menjadi ASN dan dibentuknya Dewan Pengawas yang membuat kepercayaan masyarakat kepada KPK menurun, hingga dengan kasus yang baru saja terjadi ini seakan menjadi pengingat pada kejadian sebelumnya. Menurut survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani *Research and Consulting* (SMRC) pada tanggal 15 sampai 21 september yang melibatkan 1.220

responden berusia 17 tahun ke atas, sebanyak 33,7% responden menilai pemberantasan korupsi buruk dan 14,5% menilai sangat buruk. Sementara itu hanya 20,6% yang menilai baik dan 4,3% menilai sangat baik. Sisanya 23,2% menilai kondisi pemberantasan korupsi pada tingkat sedang (Kompas.com, 2021). Terlepas dari kontra yang ada, polemik TWK ini juga menuai pro dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, yang menyatakan bahwa TWK merupakan bentuk dari penguatan wawasan kebangsaan setiap pegawai pemerintah.

Kasus ini menjadi polemik dan menarik karena fenomenanya terasa dekat dengan publik, oleh sebab itu media tidak luput dan berlomba – lomba dalam melakukan pemberitaan mengenai pemecatan pegawai KPK tersebut. Disamping itu juga adanya penurunan tingkat kepercayaan masyarakat kepada KPK, serta isu pemberantasan korupsi merupakan isu yang sensitif karena berdampak langsung kepada masyarakat, maka menjadi hal yang lumrah jika media banyak memberitakan kasus ini.

Setiap harinya masyarakat Indonesia kerap disuguhkan oleh pemberitaan melalui media massa baik itu cetak, elektronik, ataupun *online*. Hampir setiap tahun pemberitaan mengenai lembaga KPK selalu diberitakan oleh banyak media. Media memiliki peran yang penting dalam membentuk persepsi publik tentang isu – isu ataupun konflik sosial. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Anisa, 2018) menyatakan adanya pengaruh yang cukup besar yakni sebesar 66,6% dari variabel *x* (*agenda setting*) terhadap variabel *y* (persepsi), sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang cukup signifikan dari mengakses pemberitaan kasus korupsi yang terjadi terhadap persepsi publik.

Media melakukan konstruksi realitas, kemudian buah dari proses konstruksi realitas tersebut adalah adanya *framing* atau pembedaan dari media. *Framing* ini dilakukan dengan adanya penonjolan aspek yang penting dan mengesampingkan aspek yang tidak penting dari sebuah peristiwa. Menurut (Eriyanto, 2006) khalayak akan melupakan dan tidak memperhatikan aspek – aspek yang dibuat tidak menonjol.

Media dalam membingkai sebuah berita dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kepentingan ekonomi dan politik, praktek dan batasan organisatoris, *belief system*, serta usaha untuk mempengaruhi audiens (Wicks, 2005). Contohnya saja media dalam usaha untuk mencapai kepentingan ekonominya membutuhkan politik, yang dimana pemberitaan politik merupakan pemberitaan yang lebih rumit dibandingkan pemberitaan lainnya karena terdapat pembentukan opini publik didalamnya (Hamad, 2004). Oleh karena hal tersebut, maka kepentingan media menjadi hal yang paling mendasar dan umum sebagai dasar pembentukan *framing*. Maka dari itu dalam satu peristiwa yang sama media dapat memberitakan dari perspektif yang berbeda-beda. Karena hal tersebut media memiliki dampak yang tidak netral, namun beberapa masyarakat menganggap bahwa media merupakan institusi yang bebas dari nilai dan menyampaikan realitas secara apa adanya.

Dalam perspektif ekonomi politik media, ternyata media tidak bisa netral dan obyektif sebagaimana yang banyak orang harapkan. Media sangat terikat dan dipengaruhi oleh ideologi pemiliknya (*owner*). Pemilik media ikut serta dalam penentuan *angle*, arah dan framing dari isi berita yang akan ditampilkan (Musfiaily, 2019). Hal ini berlawanan dengan pernyataan bahwa berita sering dianggap memiliki berbagai kualitas netralitas dan otoritas yang pada kenyataannya tidak dimilikinya (Burton, 2008).

Media sudah sepatutnya dapat mempertahankan independensinya tanpa mengikuti kepentingan golongan, namun saat ini media berada diantara realitas sosial dengan banyak konflik kepentingan (Ahmad, 2016). Sehingga media dewasa ini tidak jarang juga digunakan sebagai alat untuk kepentingan politik. Kepentingan politik media juga dapat dikatakan sebagai dasar pembentukan *framing*. Kepentingan politik dari media ini kerap kali menunjukkan bias, terlebih lagi sekarang ini banyak tokoh politik yang juga menjabat sebagai pemilik media. Media dan politik memang mempunyai kaitan yang erat. Media membutuhkan tokoh politik untuk kepentingan ekonomi, sedangkan politik membutuhkan media untuk menyebarkan gagasan serta ideologinya kepada masyarakat.

Salah satu bentuk media massa adalah media *online*, terkait dengan jurnalisme maka outputnya dalam bentuk portal berita *online*. Portal berita *online* kini menjadi pilihan media baru bagi perusahaan pers untuk menyampaikan informasi kepada khalayak. Hal ini dikarenakan media *online* memiliki banyak keunggulan, yaitu kecepatan informasi yang dapat diberikan secara *real time*, yang tidak dimiliki oleh media konvensional seperti majalah atau koran (konvensional). Selain kecepatan informasi yang dapat diberikan, media *online* juga mampu menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat, setiap orang yang memiliki *gadget* atau *handphone* dan memiliki koneksi internet dapat mengakses informasi dengan cepat dimanapun dan kapanpun.

Masyarakat Indonesia sekarang ini pada umumnya sudah tidak dapat terlepas dengan keberadaan media *online* dan internet, terlebih lagi saat era pandemi ini, dimana kondisi mengharuskan masyarakat mengurangi aktivitas di luar dan lebih banyak menghabiskan waktu didalam rumah. Hal tersebut menyebabkan masyarakat Indonesia lebih dekat dengan aktivitas ber-internet. Hal ini selaras dengan laporan terbaru “Indonesian Digital Report 2021” dari (Hootsuite, 2021), pengguna internet Indonesia mencapai 202,6 juta hingga Januari 2021, laporan tersebut juga menunjukkan adanya peningkatan pengguna internet di Indonesia sebesar 15,5% atau lebih dari 27 juta orang dalam 12 bulan terakhir. Menurut laporan tersebut juga pengguna internet Indonesia rata rata menghabiskan waktu sebanyak 1 jam 38 menit untuk membaca media online.

Gambar 1 Indonesian Digital Report 2021



Sumber: (Hootsuite, 2021)

Salah satu media pemberitaan *online* yang aktif memberitakan tentang isu korupsi di Indonesia adalah Tempo.co. Tempo juga dikenal sebagai media yang tajam dan kritis dalam memberikan kritik kepada penguasa. Hal ini juga dilatarbelakangi oleh Tempo sebagai majalah politik yang pernah diberhentikan penerbitannya sebanyak dua kali pada tahun 1985 dan 1994 dikarenakan ketajamannya dalam mengkritik pemerintahan. Selain itu Tempo juga menjunjung jurnalisme investigasi yaitu menyajikan berita dengan membongkar fenomena yang disembunyikan / tidak diketahui dari publik. Hal tersebut yang cukup membedakan Tempo dengan media pemberitaan *online* lainnya.

Tempo.co juga tidak luput melakukan pemberitaan mengenai pemecatan pegawai KPK. Salah satu judul yang menarik dari Tempo mengenai kasus ini adalah “Pegawai KPK Sebut Pemecatan 30 September Sebagai G30STWK”. Dalam isi pemberitaannya Giri Suprapdiono yang merupakan salah satu pegawai KPK yang dipecat menjadi narasumber. Menurutnya tanggal 30 September sengaja dipilih dan dan teringat gerakan yang jahat dan kejam pada 1965 (Tempo.co, 2021). Selain itu ada juga judul yang menarik dari Tempo yaitu “Cerita 'Gagal Panen' Operasi Tangkap Tangan Gara-gara TWK” dalam isi pemberitaannya membahas tentang bagaimana musim “operasi” tangkap tangan terganjal karena sejumlah pegawai dinonaktifkan lewat Tes Wawasan Kebangsaan atau TWK (Tempo.co, 2021). Dalam pemilihan narasumber mengenai kasus ini, Tempo cenderung mengangkat eks pegawai KPK, ahli hukum, ataupun aktivis politik yang menentang keputusan pemecatan pegawai KPK.

Selanjutnya media pemberitaan *online* yang dikenal independen adalah Kompas.com, hal ini didukung dengan penghargaan dari Superbrands Indonesia yang diraih oleh Kompas pada tahun 2018 yaitu *Trusted Online News* (Kompas.com, 2018). Dilansir dari *website*-nya, Kompas.com ingin hadir di tengah pembaca sebagai acuan bagi jurnalisme yang baik di antara derasnya aliran

informasi yang tidak jelas kebenarannya. Kompas.com juga memiliki motto “Jernih Melihat Dunia” yakni memberikan informasi yang terdiri dari berbagai macam perspektif. Melalui motto tersebut Kompas.com mengajak pembaca melalui karya-karya jurnalistiknya untuk melihat harapan, menghargai perbedaan dan menjernihkan pandangan.

Kompas.com juga ikut memberitakan mengenai pemecatan pegawai KPK. Kompas.com pada tanggal 16 September 2021 mengangkat berita dengan judul “56 Pegawai KPK Dipecat, Jokowi: Jangan Apa-apa Ditarik ke Presiden”. Pemberitaan tersebut berisi bahwa Presiden Joko Widodo tidak akan banyak berkomentar dan tidak akan turun tangan menyelesaikan polemik yang terjadi, serta menunggu keputusan dari Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai persoalan tersebut (Kompas.com, 2021). Kemudian ada juga judul yang menarik adalah “Soal Pegawai KPK yang Dipecat, Polri: Semua Masih Punya Harapan dan Masa Depan”. Pemberitaan tersebut berisi Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono yang menyatakan Polri telah mengajak kepada 57 mantan pegawai KPK untuk menjadi ASN Polri tetap mengabdikan kepada negara lewat institusi Polri (Kompas.com, 2021). Sementara Kompas.com dalam melakukan pemberitaan mengenai kasus ini dengan perspektif yang lebih luas, seperti pemilihan narasumber yang bervariasi.

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana media *online* Tempo.co dan Kompas.com mengkonstruksikan serta membingkai isu pemecatan pegawai KPK. Sehingga penelitian ini juga diharapkan dapat menemukan dengan baik bagaimana realitas (peristiwa) yang sama, namun pada akhirnya dikonstruksikan secara berbeda. Pemberitaan mengenai peristiwa pemecatan pegawai KPK merupakan salah satu contoh dari sebuah peristiwa yang sama namun dikonstruksikan secara berbeda oleh media.

Alasan pemilihan pemberitaan mengenai pemecatan pegawai KPK sebagai objek analisis dikarenakan beberapa faktor. Pertama, berita mengenai isu pemberantasan korupsi merupakan isu yang sensitif karena berdampak langsung kepada masyarakat. Kedua, adanya upaya pelemahan lembaga antirasuah tersebut.

Ketiga, kemampuan media yang dapat membentuk konstruksi realitas di benak masyarakat terlebih pada isu pemecatan pegawai KPK. Keempat, pemberitaan mengenai pemecatan pegawai KPK merupakan peristiwa penting. Peristiwa ini hampir memenuhi nilai layak berita. Nilai layak berita yaitu antara lain adalah penting (*significance*), besar (*magnitude*), waktu (*timeliness*), kedekatan (*proximity*), tenar (*prominence*) dan manusiawi (*human interest*). Salah satu unsur tersebut telah dapat menjadikan suatu peristiwa layak diberitakan. Jika ditemukan lebih dari satu unsur, maka kejadian itu bertambah tinggi kelayakan beritanya, dan dianggap sebagai berita besar dan penting (Siregar, 1998).

Selanjutnya alasan pemilihan media *online* Tempo.co dan Kompas.com dikarenakan menurut survei dari Reuters Institute mayoritas masyarakat Indonesia memanfaatkan *smartphone* untuk mengakses berita. Alasan lain pemilihan kedua media *online* tersebut adalah dikarenakan Tempo.co dikenal sebagai media yang seringkali memberitakan isu pemberantasan korupsi. Selanjutnya Tempo.co juga cukup tajam dan vokal dalam melakukan kritik terhadap penguasa. Selain itu (Hutagalung, 2016) menyatakan bahwa kebijakan redaksional Tempo dalam melakukan pemberitaan mengusung prinsip konfrontasi sehingga lebih tajam, kritis, serta cenderung mengadu perdebatan antar sumber berita. Sementara itu berlawanan dari Tempo, Kompas merupakan media yang dalam penggunaan bahasanya netral dan elegan, tidak menyinggung golongan manapun karena konsep pemberitaannya yaitu untuk memberikan informasi yang berimbang dan jelas (Eriyanto, 2002; Putra, 2012). Selanjutnya Tempo.co dan Kompas.com merupakan media pemberitaan *online* yang populer di masyarakat Indonesia serta cukup berimbang dari segi penerbitan serta kemiripan rubrik yang saling sering membahas mengenai pemberitaan sosial dan politik.

Alasan lain pemilihan media *online* Tempo.co dan Kompas.com adalah karena kedua media tersebut belum lama ini telah meraih penghargaan. Kompas.com telah meraih penghargaan dari Asosiasi Surat Kabar dan Penerbit Berita Dunia (WAN-IFRA) sebagai mitra media *online* terbaik pada tahun 2020 (Kompas.com, 2020c). Sedangkan Tempo.co meraih penghargaan dari Maw Talk

Awards (MTA) sebagai lembaga media berpengaruh pada tahun 2021 (Tempo.co, 2021).

Adapun penelitian terdahulu yang melakukan teknik analisis framing pada media *online* salah satunya (Farida & Yoedtadi, 2020). Penelitian tersebut menggunakan teknik analisis framing Robert N. Entman, dan medcom.id terbukti melakukan pembingkai dengan menggunakan politik identitas dalam pemberitaan kampanye Pilpres 2019, pembingkai politik identitas yang dilakukan oleh medcom.id menyajikan pemberitaan yang mengandung SARA (suku, agama, ras dan antar golongan).

Penelitian ini memiliki kebaruan yaitu dengan menggunakan konsep ideologi media, yang dimana penggunaannya pada penelitian analisis *framing* di negara Indonesia masih jarang ditemukan. Penggunaan konsep ideologi media pada penelitian ini juga menjadi faktor yang penting dalam memahami aspek apa saja yang dapat mempengaruhi isi media, terlebih lagi dalam pemberitaan mengenai peristiwa politik.

Dari penjabaran diatas dan melihat isu mengenai pemecatan pegawai KPK yang menimbulkan polemik hingga banyaknya peristiwa yang mengikutinya, serta melihat bagaimana kecenderungan media massa dalam mengkonstruksikan atau membingkai pemberitaan mengenai suatu isu, peneliti ingin mengetahui bagaimana Tempo.co dan Kompas.com mengkonstruksi dan membingkai berita tentang kasus pemecatan pegawai KPK

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi media serta pembingkai Tempo.co dan Kompas.com pada berita tentang kasus pemecatan pegawai KPK?
2. Apa saja aspek dan isu yang ditonjolkan oleh Tempo.co dan Kompas.com pada berita tentang kasus pemecatan pegawai KPK?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Praktis

Tujuan penelitian ini adalah untuk dapat memahami dan mengembangkan pengetahuan tentang konstruksi realitas dan framing yang dilakukan oleh media dalam menyebarkan informasi. Serta dapat menambah pengetahuan baru tentang framing yang dilakukan oleh media dalam pemberitaan politik

2. Tujuan Teoritis

Tujuan penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan pada penelitian Ilmu Komunikasi, khususnya pada Jurnalistik tentang framing model Robert N. Entman yang digunakan oleh media dalam meliput pemberitaan politik

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Agar masyarakat lebih dapat memahami tentang *framing* yang digunakan oleh media. Sehingga masyarakat mempunyai perspektif yang lebih luas dan lebih bijak memaknai pemberitaan khususnya dalam pemberitaan mengenai politik serta bagaimana berpikir lebih luas dengan isu penanganan korupsi yang begitu sensitif untuk masyarakat Indonesia

2. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi hasil penelitian di bidang Ilmu Komunikasi, khususnya penggunaan framing oleh media dalam pemberitaan politik. Penelitian ini mengaplikasikan teknik analisis framing Robert N. Entman yang selanjutnya akan menambah kajian pada penggunaan analisis framing.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bermanfaat untuk mengarahkan dan mempermudah peneliti dalam penyusunan proposal skripsi. Peneliti menguraikan sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisikan mengenai uraian tentang latar belakang penelitian beserta penelitian terdahulu, rumusan masalah, tujuan

penelitian secara praktis dan teoritis, manfaat penelitian secara praktis dan akademis, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisikan mengenai uraian konsep-konsep penelitian, teori penelitian, dan kerangka berpikir sebagai landasan penelitian serta untuk menguatkan dan mendukung penelitian

Bab III Metodologi Penelitian

Pada bab ini berisikan tentang bagaimana prosedur kegiatan penelitian dilakukan, yang terbagi menjadi gambaran mengenai objek penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data, serta tabel rencana waktu

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini berisikan uraian dari hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan hasil analisis yang berlandaskan teori, metode, dan model yang digunakan

BAB V Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini berisikan uraian mengenai kesimpulan dari hasil penelitian secara keseluruhan, serta saran praktis dan teoritis dari peneliti berdasarkan temuan pada hasil penelitian

Daftar Pustaka

Berisi berbagai buku, jurnal, serta berbagai sumber lainnya yang dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan penelitian